

SKRIPSI

**PERAN TIM PENDAMPING KELUARGA DALAM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING DI DESA KUWUE KECAMATAN
MONTASIK KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2024**



**OLEH :
SRI MULIA
NPM : 2316010113**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH
2024**

PERNYATAAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERAN TIM PENDAMPING KELUARGA DALAM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING DI DESA KUWUE KECAMATAN
MONTASIK KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2024**

OLEH :

**SRI MULIA
NPM : 2316010113**

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Serambi Mekkah
Banda Aceh, 22 Juli 2024
Mengetahui,
Tim Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Cut Juliana, SKM, M.Kes)

(Dr. Ners, Masyudi, S.Kep, M.Kes)

Menyetujui,
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
DEKAN,

(Dr. Ismail, SKM., M.Pd., M.Kes)

Peran Tim Pendamping Keluarga Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Desa Kuweu
Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024

Sri Mulia, Cut Juliana, SKM, M.Kes, Dr. Ners, Masyudi, S.Kep, M.Kes

Abstrak

Stunting masih menjadi salah satu permasalahan gizi yang terjadi di Indonesia, dan ditandai dengan tubuh pendek. Anak dengan stunting akan lebih rentan terhadap penyakit serta akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Sehingga penanganan masalah Stunting dapat dimulai sejak persiapan sebelum kehamilan yaitu pada remaja, calon pengantin, dilanjutkan pada ibu hamil, ibu menyusui dan balita melalui tim pendamping keluarga. Stunting menjadi permasalahan di bidang kesehatan yang ada di Desa Kuweu. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah desa dalam menangani stunting. Kelompok TPK menjadi garda terdepan dalam penanganan stunting di Desa Kuweu. Untuk menjalankan peran, TPK telah memiliki modal sosial dalam penanganan stunting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran TPK sebagai modal sosial dalam pencegahan stunting serta hambatan TPK dalam pencegahan stunting. Teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini yakni teori modal sosial Fukuyama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Hasil penelitian menunjukkan lima peran yang dimiliki TPK dalam pencegahan stunting yakni (1) sebagai pusat informasi, (2) agen pendamping, (3) dukungan sosial, (4) wadah kerjasama, (5) unit produksi, sedangkan hambatan TPK dalam pencegahan stunting di Desa Kuweu yakni (1) dana yang sedikit, (2) pernikahan usia anak, (3) kondisi kesehatan bawaan ibu, (4) nilai norma masyarakat

Kata Kunci:

Stunting, TPK, Modal Sosial

Latar Belakang

Stunting merupakan kondisi pada anak dengan gagal tumbuh atau terlambat bertumbuh karena kekurangan gizi kronis yang dimulai sejak dalam kandungan ibu selama 1000 hari pertama kehidupan hingga usia 23 bulan (baduta) (Kementerian PPN/ Bappenas, 2018). Penyebab dari stunting adalah pola asuh yang kurang baik, pelayanan antenatal care yang kurang kepada ibu, hambatan akses rumah tangga untuk makanan yang bergizi, hambatan akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta penyakit infeksi yang diderita oleh anak. Selain itu masih terdapat penyebab dari faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik (Carolina, 2021).

Kondisi stunting bersifat tidak dapat kembali sehingga upaya signifikan yang dapat dilakukan untuk mencegah kekurangan gizi adalah dengan pencegahan stunting (World Health Organization, 2014). Secara global pada tahun 2020, sebanyak 149 juta balita di seluruh dunia menderita stunting dan berdampak pada masalah kesehatan lainnya. Data WHO juga menunjukkan bahwa lebih dari setengah balita yang menderita stunting tinggal di Asia dan Afrika.

Namun benua Asia hanya memiliki beberapa negara dengan prevalensi stunting di atas 30%, di antaranya yaitu India, Nepal, Laos, dan Indonesia. Indonesia memiliki tingkat stunting dengan kategori sangat tinggi dan dengan progress yang keluar dari jalur (belum mendekati target) (UNICEF, WHO, 2021).

Indonesia memiliki tingkat stunting mencapai 30,8% pada 2018 dan 27,7% pada tahun 2019. Walaupun mengalami penurunan, Indonesia menduduki peringkat 108 dari 132 negara dengan prevalensi stunting terbesar di dunia. Dalam berbagai indikator, pencegahan stunting di Indonesia juga masih mengalami tantangan, diantaranya kasus Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) yang masih meningkat (5,7% pada 2013 dan 6,25% pada 2018), proporsi imunisasi dasar lengkap masih menunjukkan penurunan (59,2% pada 2013 dan 57,9% pada 2018), ibu dan balita dengan kondisi kekurangan energi yang belum mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) masih cukup tinggi (74,8% dan 59%), serta anemia pada ibu hamil yang meningkat (37,1% pada 2013 dan 48,9 pada 2018) (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2018).

Berdasarkan data Dinas kesehatan Aceh tahun 2023 menyebutkan secara keseluruhan angka stunting mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Namun realitanya angka stunting masih sangat tinggi bahkan meningkat di beberapa kabupaten di Aceh. Salah satu kabupaten dengan jumlah stunting tertinggi yaitu Aceh Besar sebanyak 27. Adapun Kecamatan di Aceh Besar dengan jumlah stunting paling banyak dan terjadi peningkatan adalah kecamatan Sukamakmur. Data dinas kesehatan Aceh Besar menyebutkan jumlah balita di kecamatan Sukamakmur tahun 2023 sebanyak 1.326 orang, dari total balita yang ada di kecamatan Sukamakmur terdapat 1.026 orang balita yang mengalami stunting, angka ini meningkat dibandingkan tahun 2022 hanya sebesar 978 kasus stunting. Peningkatan terjadi karena banyak faktor salah satunya adalah pengolahan makanan yang kurang tepat dan pola asuh yang salah.

Sedangkan faktor determinan stunting di Negara berkembang diantaranya yaitu praktik pemberian makanan, budaya dan etnis, terlambat dalam inisiasi menyusui, kurangnya pengetahuan dan pemahaman ibu terkait menyusui dan diet bayi, praktik keluarga berencana, jarak antar kehamilan, vaksinasi, dan pendidikan orang tua (Aramico et al., 2020). Menanggapi data di atas, Indonesia menetapkan bahwa stunting masuk ke dalam salah satu program prioritas nasional. Untuk mewujudkan target stunting 14% pada 2024, pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyiapkan sebuah strategi nasional yang bernama Strategi Nasional Percepatan Penanggulangan Stunting. Dalam strategi nasional tersebut, terdapat kendala yaitu kurangnya advokasi, kampanye, dan diseminasi terkait stunting. Edukasi yang dilakukan kepada kader kesehatan terkait stunting termasuk ke dalam strategi spesifik pengembangan kapasitas penyelenggara (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2018).

Kader kesehatan atau yang disebut juga kader desa, kader posyandu atau kader PKK adalah perangkat desa yang dengan sukarela memberdayakan masyarakatnya sendiri demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagian besar dalam bidang kesehatan. Peran kader kesehatan dalam pencegahan stunting meliputi pemberian makanan tambahan, pembagian vitamin A, penyuluhan masalah gizi, kunjungan ke rumah, dan juga sebagai promotor kesehatan di masyarakat (Herlina, 2021). Pemberdayaan kader yang terstruktur dan komprehensif dapat mendukung terjadinya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui diseminasi/edukasi informasi kesehatan (Sianturi et al., 2013) (Rodiah et al., 2016).

Pelatihan yang dilakukan kepada kader seringkali terhambat karena mayoritas pekerjaan kader (76,7%) adalah ibu rumah tangga dimana 60% berpendidikan sekolah menengah atas dengan usia yang sangat variatif, yaitu rentang 35 hingga 60 tahun. Selain itu terdapat tiga faktor yang menyebabkan kurangnya efektivitas edukasi yang dilakukan pada kader, yaitu kurangnya pelatihan yang diberikan kepada

kader, kendala pembiayaan untuk melakukan pelatihan dan kurangnya bimbingan teknis yang diberikan kepada kader. Padahal pelatihan intensif yang diberikan kepada kader selain dapat meningkatkan skor keterampilan kader, juga dapat meningkatkan pengetahuan kader (Herlina, 2021).

Menurut Aryastami dan Tarigan dalam Rahayu Atikah, dkk. (2018) penanggulangan masalah stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak dilahirkan atau sejak periode 1000 HPK dan dari sejak ibu remaja untuk dapat memutus rantai stunting dalam kehidupan (Atikah, Rahayu, 2018). Masalah stunting di provinsi Aceh juga sedang menjadi sasaran bagi pemerintah untuk menurunkan angka stunting. Hasil Rikesdas tahun 2018 menunjukkan Aceh menduduki peringkat ketiga tertinggi prevalensi stunting pada anak balita di Indonesia yaitu 37,3 % dibandingkan rata rata nasional hanya 30,8%.

Kecamatan Montasik merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah kabupaten aceh besar dengan jumlah penduduk 21.405 Jiwa dan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, dan pedagang. Kecamatan Montasik memiliki 39 desa. Jumlah Kader Tim Pendamping Keluarga di Kecamatan Montasik : 117 Orang, Jumlah Kader Tim Pendamping Keluarga di desa 3 Orang Terdiri dari; Bidan Desa, Ketua PKK dan Kader KB.

Studi pendahuluan melalui wawancara dengan pemegang program stunting di puskesmas montasik menjelaskan bahwa, program TPK merupakan suatu program yang bertujuan untuk melakukan percepatan penurunan stunting dengan cara pendampingan terhadap empat sasaran yang dianggap memiliki risiko. Mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, dan anak usia 0-59 bulan. Program ini bersifat menggerakkan dan mengubah perilaku, yang dimana diharapkan program ini dapat menjadi upaya pencegahan terjadinya stunting pada anak. Sebelum melaksanakan kegiatannya tim TPK mendapatkan pelatihan terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil penelitian Raswati (2023) dalam peneliti mendapati peran yang dilakukan kelompok TPK dalam upaya pencegahan stunting seperti : 1) sebagai pusat informasi, 2) agen pendamping, 3) pemberi dukungan sosial, 4) wadah kerjasama, 5) unit produksi. Oleh karena itu, berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, bahwa puskesmas montasik merupakan salah satu kategori yang memiliki angka stunting yang tinggi di Kecamatan Montasik, dan sekaligus desa yang berhasil menurunkan angka stunting terbaik pada Kecamatan montasik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Tim Pendamping Keluarga Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Desa Kuwue kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar”**

Rumusan Masalah

Peran Tim Pendamping Keluarga Dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa Kuwue kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar”

Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Peran Tim Pendamping Keluarga Dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa Kuwue kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar”

Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui peran tim pendamping sebagai pusat informasi Dalam Percepatan Penurunan Stunting di kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.
- b. Untuk mengetahui peran tim pendamping sebagai agen pendamping Dalam Percepatan Penurunan Stunting di kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> c. Untuk mengetahui peran tim pendamping sebagai pemberi dukungan sosial Dalam Percepatan Penurunan Stunting di kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. d. Untuk mengetahui peran tim pendamping sebagai wadah kerjasama Dalam Percepatan Penurunan Stunting di kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. e. Untuk mengetahui peran tim pendamping sebagai unit produksi Dalam Percepatan Penurunan Stunting di kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar |
| |

Kerangka Teori

1. Pengertian *Stunting*

Stunting merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan gizi yang buruk biasanya disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya. *Stunting* diartikan juga sebagai kondisi yang buruk pada tumbuh seorang anak, akibat dari kekurangan gizi yang sifatnya kronis sehingga anak memiliki tubuh yang pendek pada usianya. Menurut Presiden Nomor 72 tahun 2021 *stunting* merupakan sebuah gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada anak akibat dari adanya kekurangan gizi yang kronis dan sifatnya sudah berulang-ulang sehingga menyebabkan adanya infeksi berulang, biasanya hal ini ditandai dengan adanya tinggi badan pada anak berada dibawah standar yang telah ditetapkan oleh menteri pemerintahan pada bidang kesehatan. Menurut *World Health Organization* (WHO) *stunting* merupakan sebuah gangguan pada tumbuh kembang yang dialami seorang anak akibat dari kekurangan gizi, atau mengalami gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai untuk tubuh (Juniati, et al., 2023).

2. Penyebab *Stunting* pada anak

Penyebab utama terjadinya *stunting* yaitu kekurangan gizi yang kronis pada anak, baik itu dari sejak bayi, ataupun dari masa kandungan, hingga pada masa kehidupan anak pada 1000 hari setelah kelahiran. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan *stunting* diantaranya yaitu faktor dari ciri khas pada orang tua mulai dari pendidikan, pekerjaan atau pendapatan, serta pola asuh, faktor genetik, kekurangan energi dan protein serta pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lainnya

3. Pengertian Percepatan Penurunan *Stunting*

Menurut Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 Pasal 1 Percepatan Penurunan *Stunting* adalah sebagai upaya yang berkaitan dengan intervensi yang spesifik dan intervensi yang sensitif yang dilakukan secara bersama sama, holistik, integrasi perlu adanya kebijakan dari pemerintah yang berkualitas yang baik melalui kerjasama antara multi sektor dan multipihak baik di pusat, daerah dan juga desa. Untuk mencapai percepatan penurunan *stunting* diperlukan

adanya solidaritas dan juga kerjasama dari berbagai multipihak harus membangun kerjasama secara baik, dan tentunya semua pihak menjalankan peran dan tugasnya sehingga terciptanya penurunan angka *stunting* dengan cepat. Percepatan penurunan *stunting* ini harus disertai dengan memberikan dorongan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan juga tingkat Desa serta juga berbagai pemangku kepentingan lainnya.

4. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 pada bab II, pasal 2 ayat 1 tujuan dari percepatan penurunan angka *stunting* yaitu dimana harus adanya program yang mampu memenuhi kebutuhan dari masalah *stunting* sebagai berikut :

1. Program yang mampu menjamin adanya penemuan gizi pada anak;
2. Program yang mampu memperbaiki pola asuh orang tua terhadap anak;
3. Program yang mampu meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang baik;
4. Program yang mampu meningkatkan perbaikan akses air minum dan juga masalah sanitasi;
5. Program yang mampu meningkatnya kualitas persiapan kehidupan keluarga yang berkualitas.

5. Rencana Aksi Nasional dalam Percepatan Penurunan Stunting

Pasal 4 ayat 1 dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 membahas terkait kegiatan utama dari rencana aksi percepatan penurunan angka *stunting* yaitu :

1. Harus menyediakan data keluarga terkait yang berisiko terkena *stunting*;
2. Melakukan pendampingan kepada keluarga yang berisiko terkena *stunting*;
3. Melakukan pendampingan kepada calon pengantin dalam usia subur;
4. Melakukan survei terhadap lansia terhadap keluarga yang berisiko terkena *stunting*;
5. Melakukan audit kasus terjadi angka *stunting*;
6. Melakukan kegiatan perencanaan dan juga kegiatan penganggaran;
7. Melakukan kegiatan pengawasan dan juga melakukan pembinaan terhadap akuntabilitas terhadap penyenggaraan dalam proses kegiatan penurunan kasus angka *stunting*;
8. Melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi dan juga pelaporan terhadap kasus angka *stunting*.

6. Sistem Kerja TPPS Tingkat Desa/Kelurahan

Penanggung jawab pelaksanaan penurunan *stunting* di desa/kelurahan yaitu dipegang oleh Kepala Desa atau lurah yang ada di desa dengan pelaksanaan mekanisme kerja yang di koordinasi oleh Ketua Tim Penggerak PKK yang ada di desa tersebut yang didukung oleh wakil ketua, sekretaris dan bidang-bidang yang terlibat dalam TPPS desa. Penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* yang ada di desa lebih difokuskan pada operasional pada data, melakukan pergerakan dan pendampingan terhadap keluarga.

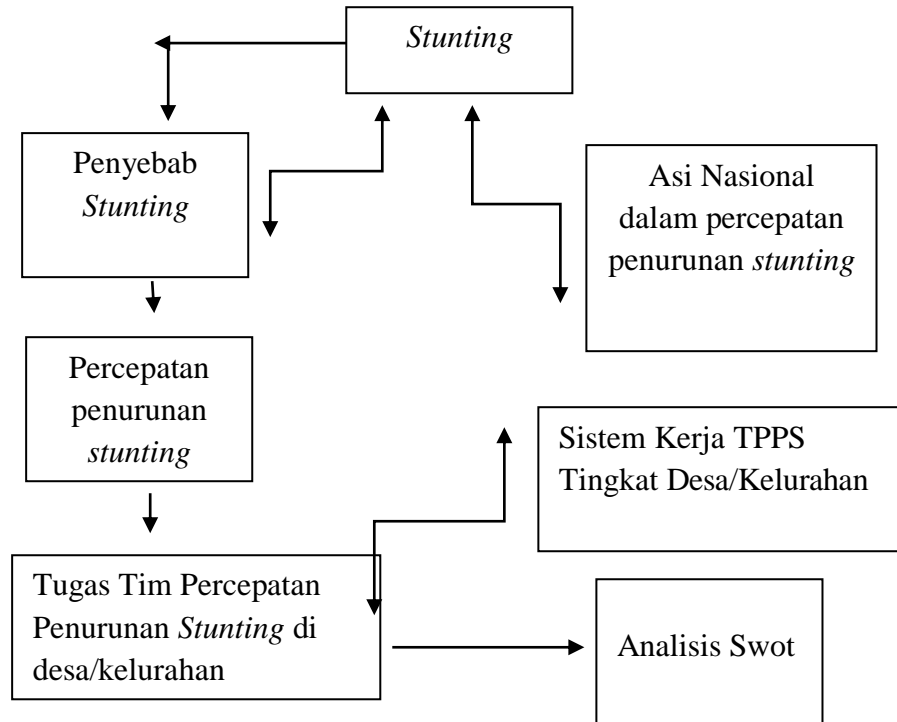
Dalam hal pembinaan dan memberi arahan terkait kebijakan umum, tim penggerak percepatan penurunan *stunting* yang ada di desa/kelurahan merujuk pada tim percepatan penurunan *stunting* yang ada pada tingkat kabupaten ataupun kota. Adapun yang menjadi pengarah dalam TPPS desa yaitu Kepala Desa atau Lurah. TPPS yang ada di desa/kelurahan menjadi pelaksana langsung dalam pelayanan dan pendampingan terhadap keluarga yang menjadi sasaran percepatan penurunan *stunting* yang hal ini dilaksanakan oleh Tim Pendamping Keluarga. Tim Pendamping Keluarga adalah salah satu kelompok yang dijadikan sebagai perbaikan dari strategi percepatan penurunan angka *stunting*, yang dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada keluarga seperti calon pengantin, Ibu yang sedang hamil, dan Ibu yang sedang menyusui, anak yang berumur 0-59 bulan.

Tim Pendamping Keluarga berasal dari kelompok tenaga pendamping yang ada di desa yaitu seperti Bidan, kader dari tim penggerak PKK itu sendiri, serta terdapat kader KB yang tugasnya untuk melakukan pendamping terhadap calon pengantin dalam usia subur, dan kepada keluarga yang berisiko terkena *stunting* seperti dapat melakukan penyuluhan atau sosialisasi, menjadi fasilitator dan menjadi pelayan guna rujukan, memfasilitasi penerima dalam program kerja bantuan serta melakukan surveilans melakukan kegiatan yang tujuan untuk mengetahui sejak dini sebab dari risiko kasus *stunting*.

7. Tugas Tim Percepatan Penurunan Stunting di desa/kelurahan sebagai berikut:

1. Menjadi fasilitas dan menjadi penanggung jawab dalam memastikan percepatan penurunan angka *stunting* yang ada di desa maupun kelurahan;
2. Menjadi fasilitas dan pendamping dalam keluarga yang berisiko terkena *stunting*, menjadi pelayan dalam keluarga yang berisiko terkena *stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan angka *stunting* di desa maupun kelurahan;
3. Melakukan kegiatan pendataan, melakukan pemantauan dan juga melakukan evaluasi secara berkala dan rutin dalam pendampingan, pelayanan bagi keluarga yang terkena *stunting* ataupun yang berisiko terkena *stunting*;
4. Melaksanakan sistem rapat rembuk masalah *stunting* tingkat desa/kelurahan minimal dalam satu kali pada waktu satu tahun;
5. Melaporkan kegiatan terkait penyelenggaraan percepatan penurunan angka *stunting* kepada pengarah dalam waktu minimal satu kali dalam satu bulan.

8. Kerangka Teori

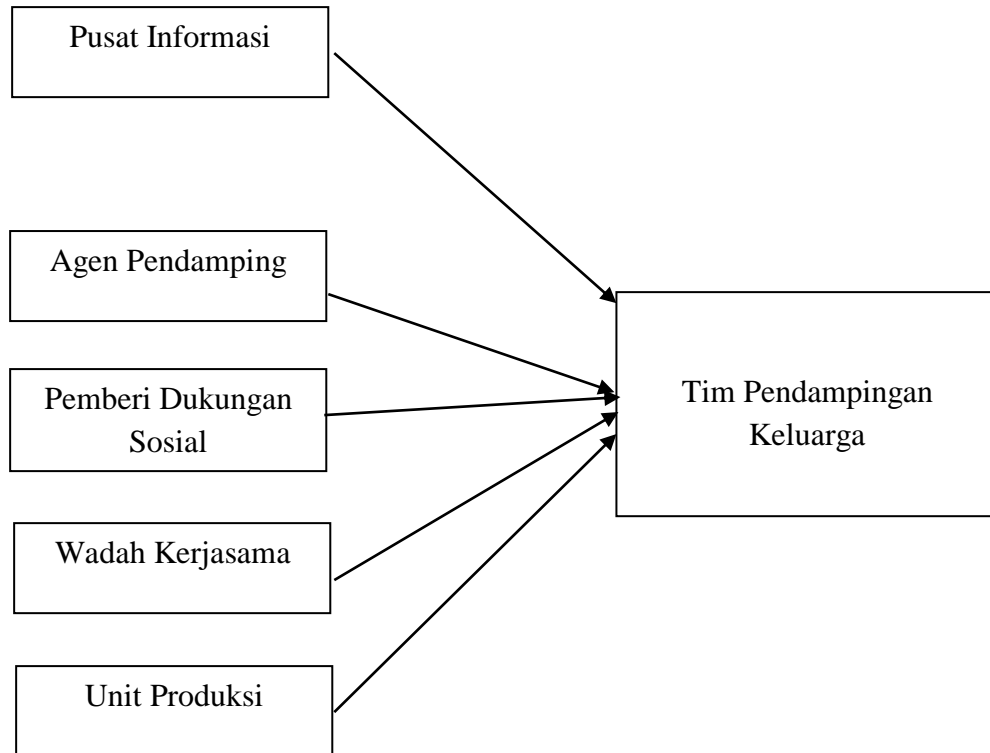


Gambar 2.1 Kerangka Teori

Sumber : Modifikasi Lawrence W. Green (1980), Juniati, et al., 2023
Soekidjo Notoatmodjo (2013:13), Budioro B (2014 : 27)

10. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2 Kerangka Konsep

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna disekelompok individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain (Creswell 2016).

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (case study). Studi kasus adalah jenis penelitian kualitatif mendalam pada individu, kelompok, organisasi dan sebagainya. Tujuan dari studi kasus adalah untuk mencoba menemukan makna, memeriksa proses dan mendapatkan pemahaman yang mendalam dan lengkap tentang individu, kelompok, atau situasi tertentu. Pendekatan studi kasus bertujuan untuk mengungkap kajian peran modal sosial TPK dalam pencegahan stunting.

Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah Kecamatan Montasik memiliki 39 desa. Jumlah Kader Tim Pendamping Keluarga di Kecamatan Montasik : 117 Orang, Jumlah Kader Tim Pendamping Keluarga di desa 3 Orang Terdiri dari; Bidan Desa, Ketua PKK dan Kader KB.

Definisi Operasional

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
Tim Pemberdayaan Keluarga	Kemampuan TPK bertindak seseorang dalam program penurunan stunting	Wawancara mendalam	Instrumen	-	-
Pusat Informasi	Informasi yang di dapatkan TPK Mengenai Stunting	Wawancara mendalam	Instrumen	-	-

Agen Pendamping	Pendampingan oleh TPK bagian Kader KB dan Bidan	Wawancara mendalam	Instrumen	-	-
Pemberian dukungan sosial	Dukungan emosional diberikan TPK berupa rasa peduli terhadap sejak Ibu masih menjadi calon pengantin, masa kehamilan sampai melahirkan.	Wawancara mendalam	Instrumen	-	-
Wadah Kerjasama	Dalam hal ini TPK sudah mampu menciptakan jaringan sosial dalam proses penanganan stunting.	Wawancara mendalam	Instrumen	-	-
Unit Produksi	TPK memproduksi PMT secara mandiri.	Wawancara mendalam	Instrumen	-	-

Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dari Tim Pemberdayaan Keluarga (TPK) Desa Kuwue Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024

Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan distribusi frekuensi univariat dari Tim Pemberdayaan Keluarga (TPK) Desa Kuwue Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Peran Kelompok TPK Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Desa Kuwue kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar

- a. Kelompok TPK menjadi garda terdepan dalam pencegahan stunting di Desa Kuwue. Setelah menjalani berbagai rangkaian kegiatan mulai dari observasi dan wawancara, peneliti mendapati peran yang dilakukan kelompok TPK dalam upaya pencegahan stunting seperti : 1) sebagai pusat informasi, 2) agen pendamping, 3) pemberi dukungan sosial, 4) wadah kerjasama, 5) unit produksi. Adapun paparan dari masing-masing peran yang dilakukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pencegahan stunting di Desa Kuwue sebagai berikut :

1. Sebagai Pusat Informasi

Salah satu peran penting TPK yakni memberikan akses informasi bagi keluarga atau keluarga berisiko stunting tentang pengetahuan umum mengenai stunting. Dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan Ibu dan keluarga stunting mengenai semua informasi tentang penanganan anak stunting. Mulai dari nutrisi, pola asuh, pola makan, kesehatan dan sebagainya. Posyandu menjadi tempat TPK untuk melakukan penyuluhan serta sosialisasi mengenai stunting untuk ibu hamil. Di luar posyandu biasanya TPK akan mengunjungi rumah-rumah masyarakat keluarga stunting untuk melakukan pemantauan disertai dengan sosialisasi-sosialisasi dalam penyebaran informasi stunting.

2. Agen Pendamping

TPK memberikan tiga jenis pendampingan yang terdiri dari : 1) pendampingan oleh TPK bagian Kader, 2) Bidan, dan 3) TPK PKK. Berikut paparan dari pendampingan yang diberikan TPK :

1) Pendampingan oleh TPK bagian Kader KB.

Kader KB mempunyai peran untuk mendampingi calon pengantin. Bentuk pendampingannya yakni membawa calon pengantin melakukan deteksi dini risiko kesehatan ke Poskesdas dan Puskesmas setempat. Program pendampingan calon pengantin berjalan dengan baik. Karena masyarakat merasakan manfaatnya, terlebih karena calon pengantin masih minim pengetahuan mengenai kesehatannya sebagai calon ibu.

TPK sudah menjalankan tugasnya sebagai wadah untuk membantu calon pengantin ke fasilitas pelayanan rujukan yang sudah disediakan. Tugas tersebut sudah tertera pada panduan BKKBN. Dan ketika calon pengantin mengikuti arahan dari TPK membuktikan bahwa calon pengantin percaya dengan TPK. Dalam modal sosial kepercayaan (trust) sangat penting untuk merekatkan antar individu dalam kehidupan kemasyarakatan. Dampak dari rasa percaya masyarakat kepada TPK membuat program-program yang akan dijalankan TPK bisa tercapai sesuai harapan yang diinginkan.

2) Pendampingan oleh Bidan

Pendampingan yang dilakukan oleh Bidan yakni kepada ibu hamil. Pendampingan biasanya dilakukan di Poskesdas dua bulan sekali. Atau ketika Ibu hamil tidak bisa ke Poskesdas maka Bidan akan mengunjungi rumahnya. Adapun bentuk pendampingannya yaitu melakukan

pemeriksaan secara rutin. Bidan juga memberikan edukasi berupa pengetahuan mengenai gizi dan pola hidup yang sehat bagi Ibu hamil.

Para ibu memiliki kepercayaan (trust) kepada bidan cukup tinggi. Ada rasa aman dan nyaman yang dirasakan ibu setelah memeriksakan diri atau anak mereka kepada bidan. Rasa aman setelah melakukan pendampingan oleh bidan membuktikan bahwa para ibu memiliki rasa percaya (trust) untuk TPK. Ibu menyerahkan rasa keamanannya selama masa kehamilan kepada TPK

3) Pemberi Dukungan Sosial

Pertama, dukungan emosional diberikan TPK berupa rasa peduli terhadap sejak Ibu masih menjadi calon pengantin, masa kehamilan sampai melahirkan. Kedua, dukungan instrumental yang mencakup pelayanan nyata bagi Calon Pengantin dengan membawa mereka untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Poskesdas atau Puskesmas setempat. Lalu ketiga, TPK juga memberikan dukungan informatif bagi Calon Pengantin berupa pemberian informasi, saran dan nasehat bagi Calon Penganti.

4) Wadah Kerjasama

Dalam hal ini TPK sudah mampu menciptakan jaringan sosial dalam proses penanganan stunting. Terbukti dengan TPK yang sudah memiliki kerjasama dengan berbagai pihak untuk membantu TPK dalam penanganan stunting di Desa Kuwue. Mulai dari Pemerintah, Instansi dan Masyarakat. Adapun pihak yang bekerja sama dengan TPK seperti Pemerintah Desa, Kepala Dusun, Puskesmas, BKKBN, Kader Desa, dan PLKB.

5) Unit Produksi

TPK memproduksi PMT secara mandiri. PMT merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui TPK untuk penanganan stunting. PMT adalah kegiatan pemberian makanan kepada balita dalam bentuk kudapan yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan. Serta mengandung nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan sasaran.

B. Hambatan TPK dalam Pencegahan Stunting di Desa Kuwue Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar

Dalam menjalankan tugasnya sebagai kelompok yang berperan dalam pencegahan stunting. Tidak jarang TPK menemukan hambatan. Dari hasil wawancara dengan Informan, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh TPK yakni : 1) dana yang Sedikit, 2) pernikahan usia anak, 3) kondisi kesehatan bawaan ibu, dan 4) nilai norma masyarakat. Berikut paparan secara jelas mengenai hambatan yang ditemukan kelompok TPK dalam penanganan stunting di Desa Kuwue Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar:

1. Dana yang Sedikit

Dana yang diberikan oleh Pemerintah Desa tidak terlalu besar untuk Stunting. Berdasarkan hasil wawancara semua ketua TPK serempak menjawab bahwa kurangnya dana menjadi salah satu

hambatan bagi TPK untuk menjalankan program penanganan Stunting. Dana dari Desa diberikan hanya untuk jatah pemberian makanan tambahan (PMT) saja. TPK menganggap bahwa dana dari desa masih sangat sedikit untuk penanganan stunting. Sedangkan dari pemerintah desa merasa cukup hanya dengan pemberian dana untuk PMT saja. Perbedaan pendapat mengenai dana antara TPK dan pemerintah desa mengindikasikan bahwa kerjasama antar keduanya sangat lemah.

2. Pernikahan Usia dini Anak

Praktik pernikahan usia anak masih banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Kuwue. Di dominasi oleh anak yang umurnya masih 15-18 tahun. Pada saat itu berarti anak masih berada di tingkat SMP dan SMA. Ada berbagai faktor yang menyebabkan pernikahan usia anak masih tinggi di Desa Kuwue. Salah satunya yaitu lingkungan baik itu kepercayaan dan pola pikir masyarakat.

Masih banyak masyarakat yang mendukung pernikahan usia anak. pernikahan usia anak juga masih didukung oleh tokoh masyarakat dan agama. Menikah dianggap ibadah dan sesuatu yang baik yang segera harus dilakukan oleh anak. Tanpa terlalu mempertimbangkan umur anak, mental dan kesiapan perekonomian anak. Bahkan di beberapa kasus orangtua dengan senang membantu membiayai pernikahan anaknya. Disisi lain anak yang mengandung saat usianya masih di bawah umur mempunyai risiko tinggi melahirkan anak stunting.

3. Kondisi Kesehatan Bawaan Ibu

Kondisi kesehatan ibu pada masa kehamilan bisa memberikan indikasi mengenai kondisi anak yang dilahirkan. Adapun indikasi kesehatan ibu yang menandakan bahwa anaknya akan dilahirkan dalam kondisi stunting yakni darah tinggi, berat badan dan tinggi badan kurang, lingkar lengan di bawah 23,5 cm. Berdasarkan informasi informan kasus Darah tinggi mendominasi penyebab stunting di Desa Kuwue. Darah tinggi sangat berbahaya bagi Ibu hamil, Ibu yang mengalami darah tinggi sudah dipastikan akan melahirkan tidak cukup bulan. Akibat yang ditimbulkan karena melahirkan tidak cukup bulan, anak akan lahir dengan kondisi berat badan rendah dan tinggi pendek. Menjadi salah satu penyebab stunting

4. Nilai Norma Masyarakat

Masyarakat Desa Kuwue masih memegang teguh nilai dan norma. Terutama pada perihal kepercayaan pada agama. Masyarakat Aikprapa memiliki tingkat religius tinggi. Selain tokoh masyarakat, tokoh agama mempunyai kedudukan tinggi di masyarakat. Tokoh agama menjadi panutan masyarakat dalam bertingkah laku dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Namun secara tidak langsung hal tersebut menjadi salah satu penghambat dalam pencegahan stunting yang ada di Desa Kuwue. Saat melakukan wawancara, informan menceritakan satu kasus yang pernah terjadi yang menyangkut kepercayaan masyarakat dan pencegahan stunting. Kasus terjadi pada tahun 2022. Saat itu melalui TPK, Desa Kuwue mendapatkan bantuan yang cukup besar dalam penanganan stunting. Bantuan berbentuk makanan seperti telur, susu,

makanan yang mengandung gizi baik khusus anak stunting. Dan rencananya bantuan tersebut bersifat tetap diberikan setiap bulan.

Tetapi ternyata bantuan tersebut berasal dari aliran/paham yang berbeda dengan masyarakat Kuwue. Dengan alasan tersebut bantuan tersebut ditolak dengan keras oleh tokoh agama Desa Kuwue diikuti oleh masyarakat yang juga menolak keras menerima bantuan tersebut.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas bisa di lihat bahwa kepercayaan (trust) masyarakat lebih tinggi kepada tokoh agama dan masyarakat dibandingkan dengan TPK. Menjadikan sebuah tantangan bagi TPK dalam menjalankan tugasnya.

1. Peran TPK dalam penanganan stunting di Desa Kuwue mencakup : 1) sebagai pusat informasi, 2) agen pendamping, 3) pemberi dukungan sosial, 4) wadah kerjasama, 5) unit produksi.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi kelompok TPK dalam proses penanganan stunting di Desa Kuwue terdiri dari : 1) dana yang sedikit, 2) pernikahan usia anak, 3) kondisi kesehatan bawaan ibu, dan 4) nilai norma masyarakat.

C. Saran

1. Bagi Pemerintah
Sebaiknya untuk terus memberikan dukungan yang lebih maksimal dengan cara memberikan anggaran dana program sehingga di Desa Kuwue tetap berjalan sesuai target
2. Bagi Kader PKK
Sebaiknya kader pkk juga melakukan Pemantauan dan Evaluasi secara teratur memantau perkembangan anak-anak dan ibu hamil di wilayah mereka serta mengevaluasi efektivitas program yang dilaksanakan.
3. Bagi Orang Tua
Orang tua juga dapat memenuhi Gizi Anak Pastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi yang mencukupi, seperti sayur- sayuran, buah-buahan, sumber protein, dan

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Elvinaro. 2011. Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif. Bandung: Simbiosis rekayasa media..
- Arya Hadi Dharmawan. 2002, "Kemiskinan Kepercayaan (The Poverty of Trust), Stok Modal Sosial dan Disintegrasi Sosial", Makalah Seminar dan Kongres Nasional IV Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) bertemakan "Menggalang Masyarakat Indonesia Baru yang Berkemanusiaan". Bogor 27-29 Agustus
- Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SGGI) 2022. 2022. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- Adriany, F., Hayana, H., Nurhapita, N., Septiani, W., & Sari, N. P. (2021). Hubungan sanitasi lingkungan dan pengetahuan dengan kejadian stunting pada balita di wilayah Puskesmas Rambah. *Jurnal Kesehatan Global*, 4(1), 17-25
- Dewi, N. W. E. P., & Ariani, N. K. S. (2022). Hubungan Pendapatan dan Asi Eksklusif dengan Kejadian Stunting pada Balita. *Malahayati Nursing Journal*, 4(8), 2163-2171.
- I. ermawan, A., Mahanim, M., & Siregar, N. (2022). Upaya Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Asahan. *Jurnal Bangun Abdimas*, 1(2), 98-104.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135-143 gabungan. Jakarta; KENCANA.
- Gunawan, I. (2022). Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik. Bumi Aksara.
- Irma, Nur. (2023). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Dalam Menurunkan Angka Stunting (Kerdil) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun. Skripsi Universitas Lampung.
- Lailiyah, K. (2023). Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn) Dalam Percepatan Penurunan Stunting Perspektif Perpres Nomor 72 Tahun 2021. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 4(1), 16-33.
- Listiani, C. (2022). Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Dalam Penanganan Kasus Stunting Pada Balita Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Lubis, K., & Ramadhanti, I. P. (2023). Edukasi Mp-Asi Dan Makanan Bergizi Sebagai Strategi Pencegahan Stunting. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1009-1014
- Mastina, T., & Mitra, M. (2023). Peran Koordinasi Lintas Sektor Dalam Aksi Konvergensi Penurunan Stunting. *Jurnal Promotif Preventif*, 6(1), 131-144.
- Nukhomariyah, T. (2023). BKKBN Harapan Pemkot Bandar Lampung Benahi Sanitasi Cegah Stunting. Diakses pada 4 Maret 2023 di

- <https://www.rmollampung.id/bkkbn-haraplikasian-pemkot-bandar-lampung-benahi-sanitasi-cegah-stunting>
- Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021. Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021. Percepatan Penurunan Stunting. Ponorogo; NATA KARYA.
- Phitra, F. A., Lipoeto, N. I., & Yetti, H. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Lokus Stunting Kabupaten Merangin Tahun 2022. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 12(3).
- Putri, C. S., & Jatiningsih, O. (2020). Pelaksanaan Peran Pkk Dalam Menggerakan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Kwadengan Barat Kecamatan Sidoarjo, 887-888.
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
- Prastowo, Andi. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Syamsudin, I. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Lerepako Kecamatan Laeya Kabupaten Lonawe Selatan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, 3(2), 120.
- Vinci, A. S., Bachtar, A., & Parahita, I. G. (2022). Efektivitas edukasi mengenai pencegahan stunting kepada kader: Systematic literature review. *Jurnal Endurance*, 7(1), 66-73.